

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) T.A 2025**



**SEKRETARIAT      DPRD  
KABUPATEN      MAMUJU**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Dengan Memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (**LKPJ**) Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dan disampaikan tepat pada waktunya. LKPJ ini merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan selama Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025 Bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, serta capaian kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, berbagai tantangan dan dinamika pembangunan dihadapi, baik yang bersumber dari kondisi internal maupun eksternal. Namun demikian, melalui sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara bertahap dan terarah sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian yang diraih tentunya tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKPJ ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Mamuju, Februari 2026

SEKRETARISDPRDKAB.MAMUJU

**Dr. MUHAMMAD HASRUL,SE,M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I / IVb

Nip. 19780414 200212 1 013

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....!	
DAPTR ISI.....!!	
BAB I PENDAHULUAN.....1	
1. Latar belakang	
2. Dasar hukum	
3. Visi dan Misi	
4. Data Umum Daerah	
BAB. II ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DPRD	
BAB. III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN SEKRETARIAT DPRD YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan	
BAB. IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota	
2. Program Dukungan Pelaksanaan tugas Dan Fungsi DPRD	
BAB. V PENUTUP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan **Laporan** Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip *good governance* yang transparan, akuntabel, dan efektif. LKPJ disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Kewajiban penyampaian LKPJ ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar hukum penyusunan LKPJ selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur ruang lingkup, mekanisme, dan sistematika penyusunan LKPJ. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah yang komprehensif dan terukur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah *melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan peraturan pelaksana yang relevan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019*. Permendagri ini memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, penyampaian, serta evaluasi LKPJ sehingga sejalan dengan praktik tata pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Selain itu, dalam upaya memperkuat pelaporan keuangan dan akuntabilitas publik secara lebih luas, pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, yang menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang akurat, terpadu, serta memadai dalam rangka mendukung transparansi dan kredibilitas tata kelola keuangan di seluruh instansi pemerintah. Meskipun PP ini lebih luas cakupannya terhadap pelaporan keuangan, substansi aturan ini turut memberi arah baru tentang pentingnya keterpaduan sistem pelaporan, termasuk di tingkat daerah, dalam rangka penguatan akuntabilitas publik.

Latar belakang penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025 juga didorong oleh kebutuhan evaluasi kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh, termasuk capaian sasaran strategis, realisasi program dan kegiatan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip efisiensi, efektifitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, LKPJ juga menjadi bahan kajian bagi DPRD dalam memberi rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pembentukan kebijakan publik ke depan.

Dengan demikian, penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025 tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) sekretariat DPRD kab. Mamuju :

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**, yang mengatur kewenangan dan kewajiban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyampaian LKPJ.
2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, sebagai landasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah secara tertib, taat aturan, efisien, dan akuntabel.
3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.
4. Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengatur pelaksanaan otonomi daerah di indonesia, termasuk:
  - Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah otonomi daerah terbatas.
  - Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.
  - Daerah dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, yang memiliki pemerintahan daerah.
  - Desa merupakan satuan pemerintahan otonomi yang dibentuk dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota

- Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang, seperti memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan perda, dan menetapkan perda.
  - Kepala daerah bertanggung jawab kepada masyarakat, DPRD, dan Pemerintah.
  - Kepala daerah bertanggung jawab kepada masyarakat, DPRD, dan Pemerintah.
5. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**, sebagai dasar pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah.
  6. **Pepres Nomor. 108 Tahun 2022** Pepres ini mengatur mengenai rencana kerja pemerintahan (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 desember tahun 2023 RKP Tahun 2023v digunakan minimal untuk 1. Pedoman bagi pemerintah dalam menyusun rancangan perundang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Nota keuangan tahun anggaran 2023). 2. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP daerah tahun 2023). 3. Sebagai dasar kementerian/lembaga dalam pemuktahiran rancangan rencana kerja kementerian/Lembaga. 4. Pedoman Bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.
  7. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
  8. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, sebagai dasar utama penyusunan LKPJ Kepala Daerah.
  9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019**, yang memberikan pedoman teknis dalam penyusunan dan penyampaian LKPJ.
  10. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**, sebagai acuan teknis penyajian data dan informasi keuangan dalam LKPJ.

11. Permen No.18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan pemerintahan (PP) no. 13 tahun 2019 Permendagri ini mengatur tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. **Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju**, sebagai dokumen perencanaan strategis daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Kabupaten Mamuju.
13. Perda no. 6 tahun 2017 Tentang hak keuangan Dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
14. **Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025**, sebagai dasar pelaksanaan dan pelaporan program, kegiatan, serta penggunaan anggaran Sekretariat Kabupaten Mamuju.

### **I.3 Visi Dan Misi Kepala Daerah**

**Visi:** Mamuju Keren, ( Kreatif, Edukatif, Ramah, energik dan nyaman).

**Misi :**

1. Menyelenggarakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Baik.
2. Mewujudkan daya Saing Ekonomi Daerah Bebasis potensi lokal.
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan kesehatan dan sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan Kearifan Lokal Budaya Serta Agama.
5. Meningkatkan Kuantitas Dan kualitas Infrastruktur, Fisik Dan Ekonomi.

### **I.4 Data Umum Daerah**

Data Umum daerah memuat informasi tentang Profil daerah secara Umum yang meliputi:

- a. Data Georafis Wilayah: Sekretariat DPRD kabupaten Mamuju tidak memiliki data Georafis Wilayah karna tercakup diwilayah kabupaten Mamuju.
- b. Jumlah Penduduk: Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju tidak memiliki Data penduduk tetapi hanya memiliki jumlah PNS dan Jumlah Anggota DPRD
- c. Pertumbuhan Penduduk: Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju tidak memiliki Pertumbuhan penduduk Jumlah PNS Sekretariat Kabupaten Mamuju :

No	Pegawai ASN Dan Non ASN	Laki- Laki	Perempuan
1	55 Orang	19	36
2	17 Orang	9	8

- d. Sebanyak 55 orang Terdiri dari Laki- laki 19 Orang dan Perempuan 36 Orang. Dan Non ASN Sebanyak 17 Orang Terdiri Dari laki- laki 9 Orang Dan Perempuan 8 Orang.

No	DPRD	Laki- Laki	Perempuan
1	30 Orang	28	2

- e. Anggota DPRD sebanyak 30 orang terdiri dari laki-laki 28 Orang dan perempuan 2 Orang.
- f. Realisasi pendapatan Menurut jenis Pendapatan: Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Memiliki tugas dan fungsi Untuk Menyelenggarakan Administratif Kesekretariatan dan keuangan, sehingga tidak memiliki jenis pendapatan belanja.
- g. Ralisasi Belanja Menurut jenis belanja : Sekretariat DPRD Untuk Tahun 2025 mengelola pagu anggaran sebesar Rp: **35,729,622,978,-** pada APBD pokok dan APBD perubahan sebesar Rp: 31,837,735,750,- atau sebesar 89,10% dengan Rician table sebagai berikut:



**PEMERINTAH KAB. MAMUJU SEKRETARIAT DPRD**  
**REALISASI ANGGARAN SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		BETAMBAH / BERKURANG	REALISASI ANGGARAN	PER	SISA PG ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUADAH PERUBAHAN				
	SEKRETARIAT DPRD	35,729,622,978	31,837,735,750	(3,891,887,228)	31,072,416,430	97,59 %	765,319,319
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 25,768,933,978	Rp 23,975,124,550	Rp (1,793,809,42)	Rp 23,446,092,959	97.79 %	529,931,590
01.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50,652,100	Rp 47,305,300	Rp (3,346,800 )	Rp 34,922,900	73.82 %	12,382,400
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 24,039,600	Rp 18,819,400	Rp (5,220,200)	9,232,600	49.05 %	9,538,800
01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,404,000	5,038,300	Rp (365,700)	Rp 5,020,200	99,64 %	17,500
01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,758,100	4,703,100	Rp (55,000)	Rp 4,693,800	99,80 %	9,300
01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4,172,100	Rp 4,134,700	Rp (37,400)	3,909,500	94,55 %	225,200
01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,065,200	3,960,200	Rp (105,000)	3,956,200	99,89 %	4,000
01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	4,015,600	6,208,100	Rp 2,192,500	3,802,500	61,25%	2,405,600

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,197,500	4,441,500	Rp 244,000	Rp 4,307,500	96,98%	134,000
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,514,966,418	4,536,080,101	4,441,500Rp. 21,113,683	Rp 4,311,194,824	96,98 %	224,885,276
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,347,070,318	4,365,251,201	Rp 18,180,883	Rp 4,146,101,924	94,97 %	224,885,276
01.02.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 144,914,000	150,204,400	Rp 5,290,400	145,284,400	93,20%	4,920,000
01.02.03	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD						
01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,010,400	7,335,000	Rp 2,675,400	7,335,000	100 %	0
01.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 6,551,700	6,518,500	(33,200)	5,702,500	87,48 %	816,000
01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,420,000	6,771,000	Rp 351,000	6,771,000	100 %	0
01.02.08	penyusunan pelaporan dan						

	prognosis realisasi anggaran						
<b>01.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>30,262,780</b>	<b>18,772,700</b>	<b>Rp 11,490,000</b>	<b>Rp 18,652,700</b>	<b>99,36 %</b>	<b>120,000</b>
01.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	402,500	-		-		402,500
01.03.02	Pengamanan BMD SKPD		120,000				120,000
01.03.02	Koordinasi dan penilaian BMD SKPD		-				
01.03.03	pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD pd SKPD		-				
01.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pd SKPD		-				
01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29,860,260	18,652,700	Rp. (11,207,560)	18,652,700	100 %	Rp 0
<b>01.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>374,361,400</b>	<b>5,048,700</b>	<b>Rp (369,312,700)</b>	<b>4,953,800</b>	<b>98,12 %</b>	<b>Rp 94,900</b>
01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	187,476,000					
01.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,840,400	Rp 5,048,700	Rp 1,208,300	4,953,800	98,12 %	94,900
01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	183,045,000	-				

	Undangan						
01.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,411,037,530</b>	<b>1,030,598,448</b>	<b>Rp (380,439,082)</b>	<b>1,017,219,270</b>	<b>98,70 %</b>	<b>13,379,178</b>
01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,805,950	1,964,000	Rp (4,841,950)	1,920,000	97,75 %	44,000
01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 6,134,000	Rp 1,961,000	(Rp 4,173,000)	Rp 1,476,500	75,29 %	484,500
01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92,220,080	Rp 65,228,148	Rp (26,870,280)	Rp 64,145,160	98,33 %	1,082,988
01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	726,071,000	674,349,800	Rp (51,721,200)	Rp 672,371,000	99,70 %	Rp 1,978,800
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						
01.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	308,990,000	245,032,000	Rp (63,958,000)	240,971,010	98,34 %	Rp 4,060,990
01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270,816,500	42,063,500	Rp (228,753,000)	Rp 36,335,600	86,38 %	5,727,900
01.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>513,332,005</b>	<b>188,232,000</b>	<b>Rp 325,100,005</b>	<b>Rp 186,795,000</b>	<b>99,23 %</b>	<b>1,437,000</b>

01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82,611,205	-				
01.07.05	Pengadaan Mebel	105,432,000	143,232,000	Rp 37,800,000	Rp 142,900,000	<b>99,76 %</b>	332,000
01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	312,810,000	Rp 45,000,000	Rp 267,810,000	Rp 43,895,000	<b>97,54%</b>	1,105,000
01.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	12,478,800	-				
01.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>802,622,281</b>	<b>637,502,437</b>	<b>Rp (165,119,844)</b>	<b>570,693,349</b>	<b>89,52 %</b>	<b>66,809,088</b>
01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	591,407,321	443,475,737	Rp (147,931,584)	Rp 379,127,349	59,47 %	64,348,388
01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116,806,960	103,538,700	(13,268,260)	102,866,000	99,35 %	672,700
01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,408,000	90,488,000	(8,920,000)	Rp 88,700,000	98,02%	Rp 1,788,000
01.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.021,415,050</b>	<b>862,226,050</b>	<b>(159,189,000)</b>	<b>Rp 803,490,423</b>	<b>93,18%</b>	<b>Rp 58,735,627</b>

01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	179,939,050	142,950,050	Rp (36,989,000)	Rp 93,729,323	65,56%	49,220,727
01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,100,000	16,600,000	(22,500,000)	13,842,100	83,38 %	2,727,900
01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,448,000	26,448,000	0	21,280,000	80,45 %	5,168,000
01.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100 %	0
01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya						
01.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	769,928,000	670,228,000	99,700,000	668,639,000	99,76 %	1,589,000
01.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>14,183,225,774</b>	<b>14,306,875,774</b>	<b>123,650,000</b>	<b>14,232,111,924</b>	<b>99,47 %</b>	<b>Rp 74,763,850</b>
01.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13,898,225,774	14,023,030,774	124,804,996	13,948,311,924	99,46 %	74,718,850
01.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	285,000,000	283,845,000	1,155,000	283,800,000	99,98 %	45,000,000

	DPRD						
01.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>2,862,058,640</b>	<b>2,342,483,040</b>	<b>(519,575,600)</b>	<b>2,266,058,769</b>	<b>96,73 %</b>	<b>76,424,271</b>
01.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	332,397,600	-	-	-		-
01.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	265,474,000	200,704,000	(64,770,000)	199,786,000	99,54%	918,000
01.16.04	Penedian Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2,264,187,040	2,141,779,040	(122,408,000)	Rp 2,066,272,769	96,47 %	75,506,271
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>9,960,689,000</b>	<b>7,862,611,200</b>	<b>(2,098,077,800)</b>	<b>Rp 7,626,323,471</b>	<b>96,99 %</b>	<b>Rp 236,287,729</b>
<b>02.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>10,335,000</b>	<b>7,410,400</b>	<b>Rp (2,924,600)</b>	<b>Rp 3,345,300</b>	<b>45,14 %</b>	<b>4,065,100</b>
02.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4,679,000	4,021,400	(657,600)	0		0
02.01.02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	5,656,000	3,345,300	(2,267,000)	3,345,300	100 %	43,700
02.01.03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan						
02.01.04	fasilitas penyusunan penjelasan/kete						

	rangan naskah akademik						
02.01.05	Penyusunan tata teretib DPRD						
<b>02.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>5,290,000</b>	<b>5,952,000</b>	Rp 662,000	5,951,500	99,99%	500
02.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 1,058,000	Rp 1,569,000	Rp 511,000	1,568,500	<b>99,96 %</b>	500
02.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 1,058,000	Rp 1,034,000	(Rp. 24,000)	Rp 1,034,000	100%	0
02.02.03	Pembahasan APBD	Rp 1,058,000	Rp 634,000	Rp (424,000)	Rp 634,000	100%	0
02.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Rp 1,058,000	Rp 1,323,000	Rp 265,000	Rp 1,323,000	<b>100%</b>	0
02.02.06	Pembahasan Pertanggungjaban APBD	Rp 1,058,000	Rp. 1,392,000	Rp. 334,000	Rp 1,392,000	100%	0
<b>02.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>23,855,400</b>	<b>1,687,400</b>	<b>22,168,000</b>	<b>Rp 20,755,100</b>		<b>Rp 61,500</b>
02.03.05	Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang sumber daya alam			-	Rp -		Rp -
02.03.06	Pengawasan lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan			-	Rp -		Rp -
02.03.07	Pengawasan penggunaan anggaran			-	Rp -		Rp -
02.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjaban Kepala Daerah	23,855,400	Rp 1,687,400	Rp. 22,168,000	Rp 1,687,400	100%	0
<b>02.04</b>	<b>Peningkatan</b>	<b>2,863,381,000</b>		<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>96,45%</b>	<b>Rp</b>

	<b>Kapasitas DPRD</b>		<b>2,957,165,000</b>	<b>93,784,000</b>	<b>2,852,260,162</b>		<b>104,904,838</b>
	Oreantasi DPRD			-			
02.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.028,617,600	1,056,504,800	(Rp.27,887,200)	Rp 984,915,762	<b>93,22%</b>	71,589,038
02.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	270,000,000	270,000,000		264,000,000	91,66%	Rp 6,000,000
02.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	144,000,000	144,000,000		144,000,000	100%	0
02.04.06	Penyelenggaraan hubungan Masyarakat	1,104,066,000	1.104,066,000		1,086,838,000	98,43%	17,228,000
02.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	606,200	228,000	(Rp. 378,200)	228,000	100%	0
02.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	316,091,200	382,366,200	Rp	372,278,400	97,36 %	10,087,800
<b>02.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>4,179,545,100</b>	<b>Rp 3,734,170,300</b>	<b>(445,374,800)</b>	<b>3,655,581,700</b>	<b>97,89 %</b>	<b>78,588,600</b>
02.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	468,579,300	90,856,100	(377,723,200)	36,112,000	39,74 %	54,744,100
02.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2,587,800	960,200	1,627,600	960,200	100 %	0
02.05.03	Pelaksanaan Reses	3,708,378,000	3,642,354,000	(66,024,000)	2,382,919,400	65,42 %	23,844,500
02.06	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>3,571,800</b>	<b>Rp.3,112,000</b>	<b>Rp (459,800)</b>	<b>Rp 2,011,600</b>	<b>64,64%</b>	<b>17,000</b>
02.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	3,571,800	Rp.3,112,000	( Rp. 459,800)	3,095,000	99,45 %	17,000
	Pengawasan kode Etik DPRD						
02.08	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>2,874,710,700</b>	<b>1,153,114,100</b>	<b>(1,721,596,600)</b>	<b>1,104,402,409</b>	<b>94,05 %</b>	<b>48,711,691</b>

02.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1,870,516,300	1,151,419,100	(719,097,200)	1,102,972,809	95,79 %	48,446,291
02.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2,052,000	731,400	Rp.1,320,600	731.000	99,93 %	400
02.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2,815,000	Rp 963,600	1,851,400	963,600	<b>100 %</b>	265,000
02.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	286,836,000	0	0	0		0
02.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	712,491,400	0	0	0		0

- h. Realisasi pembiayaan Menurut jenis Pembiayaan : Sekretariat DPRD kab. Mamuju Tidak memiliki realisasi pembiayaan.

## BAB II

### ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DPRD KAB.MAMUJU

Anggaran Belanja barang dan jasa pada sekretariat DPRD kab. Mamuju tahun Anggaran 2025 Tertuang pada table sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN 2025	
		SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>35,729,622,978</b>	<b>31,837,735,750</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25,768,933,978</b>	<b>23,975,124,550</b>
<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50,652,100</b>	<b>47,305,300</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,039,600	18,819,400
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,404,000	5,038,300
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,758,100	4,703,100
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,172,100	4,134,700
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,065,200	3,960,200
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,015,600	6,208,100
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,197,500	4,441,500
<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,514,966,418</b>	<b>4,536,080,101</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,347,070,318	4,365,251,201
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144,914,000	150,204,400
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,010,400	7,335,000
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,551,700	6,518,500
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,420,000	6,771,000
	penyusunan pelaporan dan prognosis realisasi anggaran		
<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>30,262,780</b>	<b>18,772,700</b>
02	Pengamanan BMD SKPD	402,500	120,000
	Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD		
	Koordinasi dan penilaian BMD SKPD		
	pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD pd SKPD		
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pd SKPD		
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29,860,280	18,652,700
<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>374,361,400</b>	<b>5,048,700</b>
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	187,476,000	0
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	3,840,400	5,048,700

	Pegawai		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	183,045,000	0
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,411,037,530</b>	<b>1,030,598,448</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,805,950	1,964,000
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,134,000	1,961,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92,220,080	65,228,148
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	726,071,000	674,349,800
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	308,990,000	245,032,000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270,816,500	42,063,500
<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>513,332,005</b>	<b>188,232,000</b>
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	82,611,205	-
05	Pengadaan Mebel	105,432,000	143,232,000
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	312,810,000	45,000,000
011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	12,478,800	-
<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>807,622,281</b>	<b>637,502,437</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	591,407,321	443,475,737
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116,806,960	103,538,700
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,408,000	90,488,000
<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>428,320,922</b>	<b>862,226,050</b>
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	179,939,050	142,950,050
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,100,000	16,600,000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,448,000	26,448,000
08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6,000,000	6,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		
011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	769,928,000	670,228,000
<b>2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>14,183,225,774</b>	<b>14,306,875,774</b>
01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13898,225,774	14,023,030,774
02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	285,000,000	283,845,000
<b>2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>2,862,058,640</b>	<b>2,342,483,040</b>
02	Fasilitasi Fraksi DPRD	332,397,600	0
03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	265,474,000	200,704,000
04	Penedian Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2,264,187,040	2,141,779,040
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>9,960,689,000</b>	<b>7,862,611,200</b>
<b>2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>10,335,00</b>	<b>7,410,400</b>

01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4,679,400	4,021,400
02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	5,656,000	3,389,000
	Penyelenggaraan kajian perundang- undangan		
	fasilitas penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik		
	Penyusunan tata teretib DPRD		
<b>2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>5,290,000</b>	<b>5,952,000</b>
01	Pembahasan KUA dan PPAS	1,058,000	1,569,000
02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,058,000	1,034,000
03	Pembahasan APBD	1,058,000	634,000
04	Pembahasan APBD Perubahan	1,058,000	1,323,000
06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,058,000	1,392,000
<b>2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>23,855,400</b>	<b>1,687,400</b>
	Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang sumber daya alam		-
	Pengawasan lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan		-
	Pengawasan penggunaan anggaran		-
08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	<b>23,855,400</b>	1,687,400
<b>2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2,863,381,000</b>	<b>2,957,165,000</b>
	Oreantasi DPRD		
02	Pendalaman Tugas DPRD	1,028,617,600	1,056,504,800
04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	270,000,000	270,000,000
05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	144,000,000	144,000,000
06	Penyelenggaraan hubungan Masyarakat	1,104,066,000	1,104,066,000
07	Penyusunan Program Kerja DPRD	606,200	228,000
08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	316,091,200	382,366,200
<b>2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>4,179,545,100</b>	<b>3,734,170,300</b>
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	468,579,300	90,856,100
02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2,587,800	960,200
03	Pelaksanaan Reses	3,708,378,000	3,642,354,000
<b>206</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>3,571,800</b>	<b>3,112,000</b>
01	Penyusunan Kode Etik DPRD	3,571,800	3,112,000
	Pengawasan kode Etik DPRD		-
<b>2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>2,874,710,700</b>	<b>1,153,114,100</b>
01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1,870,516,300	1,151,419,100
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2,052,000	731,400
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2,815,000	963,600
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	286,836,000	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	712,491,400	0

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan**

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan table sebagai berikut:

Tabel 3.1.2

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISAS	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DPRD
1		SEKRETARIAT DPRD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	Tak ada	Tdk ada	Tdk ada
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	100%			
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	3 Dokumen			
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan penyusunan DPA/SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen			

				Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA/SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA/SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD		4 laporan	4 laporan			
				Evaluasi kinerja perangkat daerah		4 laporan	4 laporan			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		59/12 bln/Org	59/12 bln/Org			
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen			

				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 laporan	1 laporan			
				Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan		1 laporan	1 laporan			
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mester SKPD		1 laporan	1 laporan			
				<b>Administrasi Barrang milik daerah pada perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengamanan barang milik Daerah SKPD		1 laporan	1 laporan			
				PenataUsahaan BMD pada SKPD		1 laporan	1 laporan			
				<b>Administrasi Kepegawaian perangkat daerah daerah</b>						
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 dokumen	1 dokumen			
				Monitoring, Evaliasi, dan penilaian kinerja pegawai		1 laporan	1 laporan			
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		1 laporan	1 laporan			

				<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 paket	12 Paket			
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		54 paket	54 paket			
				Penyediaan bahan logistik kantor		2 paket	2 paket			

				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		13 paket	13 paket			
				pasilitas kunjungan tamu		18333 laporan	18333 laporan			
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		160 laporan	160 laporan			
				<b>Pengadaan barang barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		2 Unit	2 unit			
				Pengadaan mebel		1 unit	1 unit			
				Pengadaan peralatan mesin dan mesin lainnya		5 unit	5 unit			

				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		3 unit	3 unit			
				<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		3 laporan	3 laporan			
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		8 laporan	8 laporan			
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 laporan	12			
				<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			

				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		5 unit	5 unit			
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		25 unit	25 unit			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		13 unit	13 unit			
				Pemeliharaan aset tak berwujud		2 unit	2 unit			
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1 unit	1 unit			
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit	1 unit			
				<b>Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			

				Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah		12 bln/Org	12 bln/Org			
				Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD		1 paket	1 paket			
				<b>Layanan administrasi DPRD</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Fasilitas fraksi DPRD		6 laporan	6 laporan			
				Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		6 laporan	<b>6 laporan</b>			
				Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD		12 laporan	12 laporan			
2				<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			

				Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD		1 dokumen	1 dokumen			
				Penyusunan dan pembahasan program Pembentukan peraturan daerah dan peraturan daerah		1 dokumen	1 dokumen			
				Pembahasan rancangan peraturan		28 Dokumen	<b>28 Dokumen</b>			
				<b>Pembahasan kebijakan Anggaran</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pembahasan dan PPAS		1 Dokumen	1 Dokumen			

				Pembahasan perubahan kua dan perubahan PPAS		7 Dokumen	1 Dokumen			
				Pembahasan APBD		7 Dokumen	1 Dokumen			
				Pembahasan APBD perubahan		7 Dokumen	1 Dokumen			
				Pembahasan perubahan kua dan perubahan PPAS		7 Dokumen	1 Dokumen			
				Pembahasan pertanggungjawaban APBD		7 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah		1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Peningkatan kapasitas DPRD</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			

				Pendalaman tugas DPRD		61 Dokumen	61 Dokumen			
				Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		10 Org	10 Org			
				Penyediaan tenaga ahli fraksi		6 Org	6 Org			
				Penyelenggaraan hubungan kamasvarakat		30 ORG	30 ORG			
				Penyusunan program kerja DPRD		1 dokumen	1 dokumen			
				Publikasi dan dokumentasi dewan		12 Dokumen	12 Dokumen			
				<b>Penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kunjungan kerja dalam daerah		244 laporan	244 laporan			
				Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD		1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pelaksanaan reses		3 Dokumen	3 Dokumen			

				<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyusunan kode etik DPRD		1 laporan	1 laporan			
				<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		124 Dokumen	124 Dokumen			
				Penyusunan laporan Kinerja DPRD		1 laporan	1 laporan			
				Fasilitas pelaksanaan tujan badan musyawarah		1 laporan	1 laporan			
				Fasilitas Tugas pinpinan DPRD		1 Dokumen	1 Dokumen			
				Fasilitas Pelaksanaan tugas panitia Khusus		1 Dokumen	1 Dokumen			

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 Anggaran dan realisasi dana untuk membiayai kegiatan sekretariat DPRD kabupaten Mamuju tahun 2025 untuk program dan kegiatan tersedia anggaran sebesar Rp. 31,837,735,750 dan telah terealisasi sebesar Rp. 31,072,416,430 atau dapat dihitung menjadi total serapan sekitar 97,59%.

Sesuai dengan target kinerja tahun 2024 sebagaimana yg dikemukakan didalam RPJMD mencakup pelaksanaan 2 program untuk mendukung misi 4 yang termuat didalam RPJMD. Berdasarkan pengukuran kinerja semua program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2025 rata – rata tingkat capaian kinerja dari program ini sebesar 100%, dengan serapan dana 97,59%. Tingkat capaian keberhasilan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator yaitu Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dan Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan.

Ada beberapa sub kegiatan yang sudah mencapai mencapai 97 % realisasi dalam program ini, antara lain :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah hanya mencapai 0,50%; Dari ketersediaan anggaran sebesar Rp.18,819,400- tersisa anggaran Rp. 9,586,800,- dari rekening Belanja perjalanan Dinas Dalam kota. Adapun anggaran tidak terealisasi seluruhnya karena perencanaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah terkait dokumen perencanaan di akhir tahun tidak terlalu banyak diadakan, sehingga anggaran tersebut tidak direalisasikan sesuai tujuannya.
- b. Evaluasi Kinerja perangkat daerah mencapai 0,30%; Dari ketersediaan anggaran sebesar Rp.4,441,500- tersisa anggaran Rp.134,000,- dari rekening belanja cetak, belanja ATK dan Belanja Makanan dan Minum Rapat. Adapun anggaran tidak terealisasi seluruhnya karena tidak terlalu banyak rapat terkait kinerja ASN yang dilaksanakan, sehingga anggaran dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan saja.

- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor mencapai 0,97%,- Dari ketersediaan anggaran sebesar Rp. 1,964,000,- tersisa anggaran Rp. 44,000 dari rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik. anggaran terealisasi hampir seluruhnya dikarenakan penggunaan komponen listrik yang butuhkan tahun 2024 meningkat di banding tahun sebelumnya .
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan hanya mencapai 0,65%; Dari ketersediaan anggaran sebesar Rp. 179.939.050,- adanya pergeseran anggaran diperubahan senilai Rp. 36,989,000,- tersisa setelah perubahan 142,950,050,- dan terealisasi sebanyak Rp. 93,729,323,- tersisa anggaran Rp. 49,220,727,- dari rekening belanja pembayaran pajak, dan perizinan dan rekening belanja pemeliharaan angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan. Adapun anggaran tidak terealisasi merupakan kesisahan. Adapun Kegiatan ditahun 2025 tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang tersedia di kegiatan sebelumnya di geser setelah perubahan kekegiatan yang lebih urghen dari kekegiatan sebelumnya nama kegiatan yang tergeser yaitu: **Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya, bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan, Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, Fasilitas fraksi DPRD.**

## 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pada Tahun 2025, rata – rata tingkat capaian kinerja dari program ini sebesar 100%, dengan serapan dana 97,59%. Tingkat capaian keberhasilan sasaran ini diukur menggunakan indikator yaitu Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD.

Ada beberapa sub kegiatan yang mencapai 90% realisasi dalam program ini, antara lain :

- a. Fasiltasi Tugas pimpinan DPRD Rp: 286.836.000, bergeser di perubahan ke kegiatann yang lebih Penting.
- b. Fasiltasi pelaksanaan Tugas panitia khusus Rp. 712.491.400,- bergeser di perubahan ke kegiatan yang lebih penting.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sekretariat DPRD kabupaten Mamuju telah menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik ( Good Governance ) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Anggaran dan Realisasi dana untuk membiayai kegiatan sekretariat DPRD kabupaten mamuju tahun anggaran 2025 untuk program dan kegiatan tersedia anggaran sebesar Rp.

31,837,735,750 dan telah terealisasi sebesar Rp. 31,072,416,430 ,- atau dapat dihitung menjadi total serapan sekitar 97,59%.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju selama Tahun Anggaran 2025, baik dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan maupun dari sisi pengelolaan anggaran, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian guna peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Seluruh capaian kinerja yang telah direalisasikan, baik kegiatan yang berhasil dilaksanakan secara optimal maupun kegiatan yang belum sepenuhnya mencapai target, telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga.

Pembelajaran tersebut menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis atas capaian kinerja Tahun Anggaran 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju merumuskan beberapa saran dan langkah strategis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja pada periode selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

**1. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju perlu lebih proaktif dalam menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan instansi pemerintah pusat. Koordinasi yang efektif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta meminimalkan kendala administratif maupun teknis.

**2. Penyusunan Perencanaan yang Lebih Realistis dan Terukur**

Perencanaan program dan kegiatan ke depan perlu disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta kondisi aktual yang dihadapi. Perencanaan yang matang dan terukur akan membantu meningkatkan tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja yang lebih optimal.

**3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlu dilakukan secara periodik dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan kendala atau hasil yang belum optimal, perlu segera dilakukan langkah korektif agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara maksimal.

**4. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran**

Pengelolaan anggaran perlu terus dioptimalkan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata serta mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju secara keseluruhan.

## **5. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur perlu terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan berkelanjutan. Aparatur yang profesional dan kompeten diharapkan mampu memberikan pelayanan administrasi dan fasilitasi yang lebih baik kepada DPRD.

## **6. Penguatan Komitmen dan Pemahaman Target Kinerja**

Seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sosialisasi rencana kerja dan target kinerja harus dilakukan secara berkelanjutan agar komitmen bersama dalam mencapai sasaran dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi daerah.

Dengan dilaksanakannya berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat, serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, Kegiatan anggaran yang berhasil Terlaksana maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja

2025, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecah masalah yang akan dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kerja akan datang Di Tahun 2025 Kedepannya yaitu sebagai berikut :

1. Lebih proaktif menjalin kerjasama dengan OPD terkait, terutama instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia
3. Melakukan evaluasi kegiatan secara periodik apabila hasil kegiatan kurang optimal

4. Kegiatan monitoring yang telah ditentukan, selayaknya dioperasionalkan secara teliti
5. Perencanaan dan target kinerja Sekretariat DPRD Kab. Mamuju harus secara terus menerus disosialisasikan kepada seluruh jajaran ASN dari berbagai tingkat struktural, sehingga komitmen untuk mencapai sasaran dapat terwujud sesuai visi yang telah ditetapkan
6. Lebih meningkatkan kapasitas aparatur.

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mamuju.

Mamuju, Februari 2026

**SEKRETARIS DPRD KAB.MAMUJU**

**Dr. MUHAMMAD HASRUL,SE,M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I / IVb

Nip. 19780414 200212 1 013